

## IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE PADA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT BIDANG SUMBER DAYA KELITBANGAN

**Apri Dwi Astuti**

*Universitas Swadaya Gunung Jati*

[Apri\\_dwiastuti@yahoo.co.id](mailto:Apri_dwiastuti@yahoo.co.id)

**Arinal Muna**

*Universitas Swadaya Gunung Jati*

[arinalmunaaa@gmail.com](mailto:arinalmunaaa@gmail.com)

### **Abstrak**

Kinerja ASN masih pro dan kontra di mata masyarakat. Adanya kasus korupsi yang muncul meresahkan masyarakat sehingga menurunkan tingkat kepercayaan publik pada pemerintah. Berdasarkan fenomena tersebut, maka penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana implementasi *good governance*, khususnya pada kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat bidang sumber daya kelitbangan. Pengambilan data dilakukan dengan metode dokumentasi terkait informasi apa saja yang berhubungan dengan kementerian PUPR dan prosedur operasional yang berlaku di sana. Lebih menarik lagi, didapatkan kesempatan wawancara mendalam dengan ASN yang ditugaskan di Pusjatan, Bidang SDK – Kementerian PUPR. Melalui studi kualitatif dengan penekatan deskriptif, maka didapatkan gambaran terkait praktik penerapan *good governance* berdasarkan unsur utamanya, akuntabilitas, transparansi, keterbukaan dan aturan hukum.

**Kata kunci: Implementasi *good governance*; Kementerian PUPR**

### ***Abstract***

*ASN's performance is still pros and cons in the publisher view. The existence of corruption cases that appear unsettling the public thereby reducing the level of public confidence in the government. Based on this phenomenon, this research is aimed to find out how the implementation of good governance, especially in the ministry of public works and public housing in the field of resources. Data is collected using the documentation method that is related to any information based on the Ministry of Public Works and operational procedures that are applied there. Even more interesting, there was an opportunity for in-depth interviews with ASN assigned to Pusjatan, SDK Sector - PUPR Ministry. Through a qualitative study with a descriptive approach, we get an overview that is related to the practice of implementing good governance based on its main elements, accountability, transparency, openness and rule of law.*

***Keywords: Implementation of good governance; Ministry of PUPR***

## PENDAHULUAN

Tuntutan terselenggaranya *good governance* dalam Implementasi penerapan otonomi daerah, tidak sekedar tuntutan yuridis formil, tetapi lebih dari itu adalah bukti nyata adanya tuntutan atas peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan kinerja instansi pemerintahan. Hal ini telah berdampak pada pergeseran paradigma manajemen sektor publik (pemerintah), khususnya di pemerintah daerah yang telah mengarah kepada perwujudan pemerintahan yang demokratis, responsive, akuntabel, serta peningkatan kinerja organisasi pemerintah (Pattiasina dkk,2010).

Kinerja instansi pemerintahan masih mengalami pro dan kontra dimasyarakat. Hal ini banyak disebabkan karena banyaknya kasus korupsi yang menimpa pejabat maupun ASN dalam instansi pemerintahan. Salah satu kasus korupsi yang menimpa adalah kasus kementerian perhubungan dilakukan oleh salah satu pejabatnya. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang melibatkan bekas Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Antonius Tonny Budiono. Budi Karya menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait dengan kasus dugaan suap pengurusan perizinan dan pengadaan proyek-proyek di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut (Hubla), Kementerian Perhubungan, untuk tersangka Adiputra Kurniawan, Komisaris PT Adhiguna Keruktama. KPK menelusuri proyek lain yang diduga terkait dengan kasus suap Rp 1,147 miliar, yang diberikan Adiputra untuk Tonny Budiono. Adiputra diduga telah menyuap Tonny untuk proyek pengerjaan pengerukan Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang. Pemberian suap tersebut diduga dilakukan Tonny untuk melancarkan proses lelang dan pengerjaan. Antonius Tonny Budiono ditangkap penyidik KPK dalam operasi tangkap tangan pada 23 Agustus 2017. Dalam penangkapan itu, penyidik menyita 33 tas berisi uang Rp 18,9 miliar. Selain itu, KPK menyita kartu ATM atas nama seseorang yang diduga fiktif berisi Rp 1,174 miliar. Uang di rekening ATM itu diduga berasal dari Adiputra untuk Tonny (tempo, Selasa 17

november 2017). Dari banyaknya kasus yang terjadi di instansi pemerintahan perlu diterapkannya *good governance* sebagai alat control manajemen untuk tercapainya organisasi yang sehat dan bebas korupsi.

*Good Corporate Governance* (GCG) merupakan suatu struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh pihak internal maupun eksternal untuk mengatur, mengawasi, dan menyeimbangkan pola hubungan antar pemilik dan stakeholder. GCG tidak hanya diterapkan oleh organisasi profit, tetapi diterapkan juga pada organisasi nirlaba (Meriani dkk, 2017).

Darmawati, dkk. (2004) menyatakan bahwa faktor penting dalam hal penataan organisasi publik guna pencapaian kinerja yang maksimal sesuai dengan dinamisasi lingkungan adalah menerapkan *good corporate governance*. Dalam perkembangannya, GCG semakin mempunyai peranan yang sangat penting bagi organisasi, yakni sebagai alat kontrol manajemen dalam meningkatkan kinerja perusahaan dan upaya menciptakan organisasi yang sehat. Secara umum *good public and corporate governance* memiliki manfaat yang positif guna mendukung kinerja suatu organisasi. Argumen ini didukung oleh hasil kajian empirik Day report (1994) dalam Kusumawati, dkk. (2005) mengemukakan bahwa *corporate governance* yang efektif dalam jangka panjang akan dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan mengutungkan pemegang saham. Peningkatan ini tidak hanya untuk pemegang saham tetapi juga untuk kepentingan publik secara umum. Senada dengan penelitian di atas Darmawati, dkk (2004) mengemukakan bahwa implementasi GCG mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dwiridotjahjono (2010), ada beberapa kendala implementasi GCG di Indonesia salah satunya adalah Kendala Budaya. Adanya dan telah membudayanya anggapan bahwa tindakan penyelewengan (*fraud*) maupun transaksi dengan orang dalam hanyalah merupakan hal yang biasa dan lumrah dilakukan dan bahkan

tindakan korupsi dipandang sebagai sesuatu tindakan yang tidak salah. Kondisi ini ditambah lagi dengan masih lemahnya praktik pengungkapan dan keterbukaan.

Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi dimana kehidupan masyarakat semakin kompleks, dalam hal ini organisasi sektor publik semakin banyak memperoleh tekanan untuk selalu memperbaiki kinerjanya. Dengan adanya otonomi daerah (sesuai amanat UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 33 tahun 2004), maka memberi dampak bagi Pemerintah Daerah (Pemda) dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan masyarakat. Untuk melakukan aktivitas pelayanan, pengaturan, pembinaan, koordinasi dan pembangunan dalam berbagai bidang (Tunti, 2013). Baik buruknya kinerja para aparatur pemerintahan dapat ditentukan oleh beberapa faktor, namun faktor yang dijadikan pertimbangan ada tiga faktor yaitu penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance*, komitmen organisasi, dan gaya kepemimpinan (Handoko, 2015).

Arens, et al. (2008) dalam Gozali (2012) menyimpulkan baik buruknya *good corporate governance* perusahaan diIndonesia memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan pengendalian internal pada perusahaan tersebut. Lingkungan pengendalian merupakan kondisi obyektif yang ada pada organisasi, karena sangat mendasarnya komponen lingkungan pengendalian sebagai aspek pengendalian internal maka penerapan *good corporate governance* sangat besar kaitannya dengan kinerja perusahaan. Faktor kedua adalah komitmen organisasi, Tugiman (2000) dalam Taufik dan Kemala (2013) menyatakan bahwa untuk menciptakan *good corporate governance* dalam institusi tidak lepas dari adanya komitmen. Selain itu komitmen yang tinggi akan menciptakan *economy*, *effeciency*, dan *effectiveness*, yang pada akhirnya akan bermuara pada kinerja organisasi. Faktor ketiga adalah gaya kepemimpinan, kualitas dari pemimpin seringkali dianggap sebagai faktor terpenting dalam keberhasilan atau kegagalan organisasi (Bass, 1990, dalam Menon, 2002) demikian juga keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi baik yang berorientasi bisnis

maupun publik, biasanya dipersepsikan sebagai keberhasilan atau kegagalan pemimpin. Penelitian ini berfokus pada kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat sehingga penggunaan good corporate governance diganti dengan good governance tanpa mengurangi maknanya.

## LANDASAN TEORI

### Teori Keagenan

Menurut Jensen dan Meckling (1976) teori keagenan adalah sebuah kontrak antara manajer (*agent*) dengan pemilik (*principal*). Dalam Januar (2016), hubungan yang terjalin antara agent dan principal serta pemisahan tugas diantara keduanya dapat mengakibatkan permasalahan keagenan (*agency problems*). Masalah pertama adalah terjadinya suatu konflik kepentingan (*conflict of interest*) akibat adanya perbedaan tujuan di antara agent dan principal. Masalah kedua adalah terjadinya suatu asimetri informasi, dimana manajemen sebagai *agent* mengetahui serta memiliki lebih banyak informasi mengenai kondisi perusahaan daripada *principal*.

Asimetri informasi juga dapat menyebabkan dua permasalahan yang terbagi menjadi dua. Pertama, *moral hazard*, yaitu bahwa kegiatan yang dilakukan manajemen (*agent*) tidak seluruhnya diketahui oleh pemilik (*principal*) sehingga manajemen dapat bertindak diluar pengetahuan pemilik yang tindakannya melanggar kontrak dan sebenarnya secara etika atau aturan mungkin tidak layak untuk dilakukan. Kedua, *adverse selection*, merupakan suatu kondisi dimana pemilik (*principal*) tidak dapat mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil oleh manajemen (*agent*) benar-benar bersumber atas informasi yang telah diperolehnya atau terjadi sebagai sebuah kelalaian atau kecerobohan dalam tugas. Mekanisme yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini adalah dengan menerapkan tata kelola yang baik (Meriani, 2017).

### Good Governance

Governance diartikan sebagai mekanisme, praktek dan tata cara pemerintahan dan

warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah masalah publik. Dalam konsep governance, pemerintah hanya menjadi salah satu actor dan tidak selalu menjadi aktor yang menentukan. Implikasi peran pemerintah sebagai pembangunan maupun penyedia jasa layanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas. Governance menuntut redefinisi peran negara, dan itu berarti adanya redefinisi pada peran warga. Adanya tuntutan yang lebih besar pada warga, antara lain untuk memonitor akuntabilitas pemerintahan itu sendiri (hetifa,2003).

Dapat dikatakan bahwa good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political frame work bagi tumbuhnya aktifitas usaha.

## **METODE PENELITIAN**

### **Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Bandur (2016) berpendapat bahwa penelitian deskriptif bertujuan untuk menyediakan informasi atau mendeskripsikan tentang topic dan responden penelitian yang terlibat. Tujuan utamanya adalah untuk mempresentasikan informasi demografis mengenai responden dan mendiskusikan isu-isu yang muncul dalam topic penelitian. Pendapat lain dari Sanusi (2011) yang mengatakan bahwa desain penelitian deskriptif adalah desain penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek atau objek penelitian.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Menurut Sanusi (2011), observasi merupakan cara pengumpulan data melalui proses pencatatan perilaku subjek (orang), objek (benda), atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Sanusi (2011) menjelaskan bahwa wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Sugiyono (2013) mengatakan bahwa dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.

### **Teknik Analisis Data**

Mengacu kepada teknik analisis data kualitatif milik Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2013), teknik analisis data pada penelitian ini terbagi menjadi tiga langkah, yaitu (1) tahap reduksi data (*data reduction*), (2) penyajian data (*data display*), (3) dan yang terakhir penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

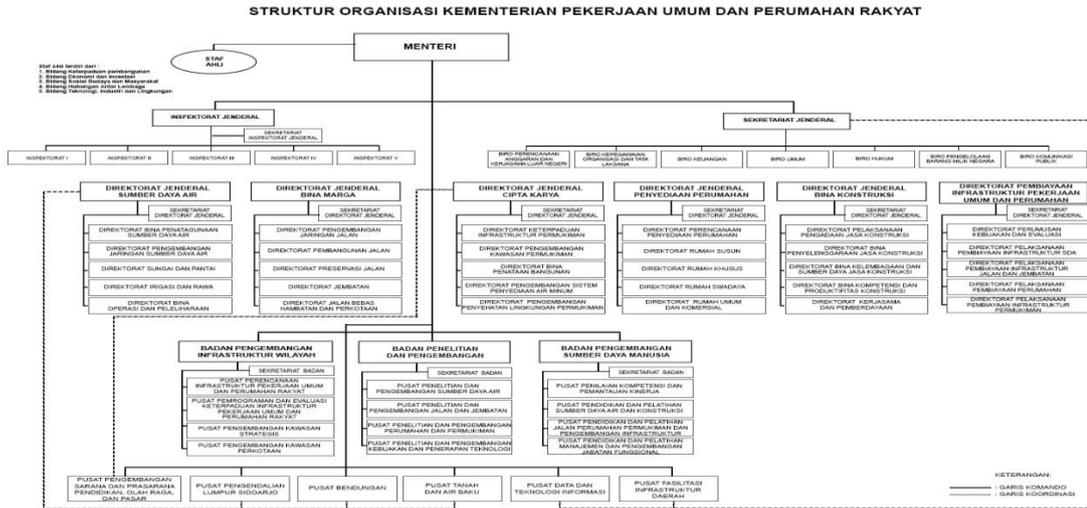
### **Hasil dan Survei Penelitian**

Penelusuran berbagai referensi dilakukan sebagai langkah awal untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan pada awal laporan ini ditulis. Sesuai dengan duduk permasalahan, maka dipilih serangkaian prosedur untuk mendapatkan jawaban, yakni dengan melakukan wawancara kepada salah satu Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di Kementerian PUPR bidang SDK. Selain itu, didapatkan pula berbagai prosedur operasional yang berkaitan dengan pekerjaan bidang SDK.

### **Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)**

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Demi memudahkan proses analisa, berikut disajikan gambar stuktur organisasi di kementerian PUPR:



**Kementerian PUPR Badan Penelitian dan Pengembangan (BALITBANG)**

Badan Penelitian dan Pengembangan (BALITBANG) merupakan 1 (satu) dari 13 Eselon I yang ada dalam Kementerian PUPR. Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

**Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan (Pusjatan)**

Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan (Pusjatan) merupakan salah satu Eselon II yang berada di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sesuai dengan Perpres No 15 tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Adapun tugas dan fungsi Pusjatan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

**Pusjatan - Bidang Sumber Daya Kelitbangan (SDK)**

Bidang Sumber Daya Kelitbangan (SDK) merupakan 1 (satu) dari 8 (delapan) Eselon

III yang berada di bawah Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan. SDK mempunyai tugas melaksanakan urusan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pengelolaan sarana penelitian dan pengembangan di bidang jalan dan jembatan.

### **Implementasi Good Governance pada Pusjatan Bidang SDK- Kementerian PUPR**

Berdasarkan hasil wawancara dengan ASN yang bekerja di Pusjatan Bidang SDK – Kementerian PUPR, maka diperoleh jawaban atas praktek tata kelola pemerintahan yang diterapkan di sana. Berikut adalah hasil temuan praktik *good governance* pada Pusjatan Bidang SDK – Kementerian PUPR:

#### ***Akuntabilitas***

Fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban Bidang Sumber Daya Kelitbangan ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Aktivitas dan proses bisnis yang berlangsung di Bidang SDK mengacu kepada Peraturan Menteri PUPR tersebut .

Bidang SDK patuh terhadap peraturan-peraturan perundangan yang berlaku. Setiap judul paket kegiatan di Bidang Sumber Daya Kelitbangan dibuat laporan bulanan, laporan pendahuluan, laporan antara dan laporan akhir. Laporan tersebut dipresentasikan di depan kepala Pusjatan. Setiap kegiatan yang mencakup urusan administrasi kepegawaian, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pengelolaan sarana dilakukan berdasarkan peraturan perundangan-undangan seperti UU no 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, PP 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil,dll.

Dalam rangka meningkatkan kepuasan pelanggan, perbaikan berkelanjutan (continuous improvement), serta mengelola risiko yang muncul dari aktivitas dan proses

bisnis tersebut, maka Puslitbang Jalan dan Jembatan menerapkan Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001:2015) dan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Pengujian (ISO 17025), Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (OHSAS 18001:2007), serta Sistem Manajemen Lingkungan (ISO 14001:2015). Bidang SDK yang merupakan bagian dari Pusjatan juga menerapkan keempat sistem tersebut. Bidang Sumber Daya Kelitbangan (SDK) merupakan satu dari delapan eselon tiga yang ada di Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan (Pusjatan).

Keterbukaan informasi yang diterapkan di Bidang SDK menginduk ke Pusjatan. Pusjatan memiliki prosedur permohonan informasi publik. Prosedur ini dapat diakses di [www.pusjatan.pu.go.id](http://www.pusjatan.pu.go.id). Berikut alur permohonan informasi di Pusjatan:



Pusjatan memiliki Perpustakaan. Perpustakaan ini di bawah koordinasi Bidang SDK. Adapun layanan Perpustakaan adalah sebagai berikut: erpustakaan buka setiap hari Senin sampai Kamis dari 09.00 WIB - 16.00 WIB Istirahat pukul 12.00-13.00 WIB. Hari Jumat dari pukul 09.00 WIB - 16.30 WIB. Istirahat pukul 11.00-13.00 WIB. Hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional Perpustakaan TUTUP Sistem layanan yang digunakan adalah sistem Terbuka. Sistem ini memperbolehkan pengguna untuk mencari sendiri buku yang dibutuhkan. Jenis layanan yang disediakan yaitu Layanan sirkulasi (Peminjaman Dan Pengembalian), Layanan Referensi, Layanan Jurnal dan Majalah, dan Layanan Fotocopy

**Keterbukaan**

Adanya laman yang memberikan kesempatan bagi siapa saja untuk menyampaikan pesan kepada pusjatan. Hal ini dapat dilihat pada website pusjatan dengan link <http://www.pusjatan.pu.go.id/home/contact>. Dengan adanya laman tersebut warga negara dapat dengan bebas menyampaikan pendapatnya kepada pihak terkait. Meskipun, tidak dalam waktu singkat pesan tersebut dapat direspon, setidaknya ada tempat untuk menyampaikannya. Dengan dibukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilai tidak transparan, maka Pusjatan Bidang SDK – Kementerian PUPR dianggap memiliki keterbukaan kepada para *stakeholder* di Indonesia.



Gambar : media penyampaian pendapat, kritik dan saran ke Pusjatan Bidang SDK Kementerian PUPR

### **Aturan Hukum**

Berdirinya Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan – Bidang Sumber Daya Kelitbangan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah disahkan oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019. Artinya adanya jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh, khususnya di Bidang SDK kementerian PUPR.

Berdasarkan lima unsur utama tersebut, disimpulkan bahwa tidak ada asimetri informasi terkait layanan yang diberikan. Sebab praktik *good governance* dinilai berhasil diterapkan pada Pusjatan, Bidang SDK – Kementerian PUPR.

### **KESIMPULAN**

Riset ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan bagaimana praktik penerapan *good governance* pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan, Bidang Sumber Daya Kelitbangan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Hasil riset yang telah dipaparkan menunjukkan bahwa praktik *good governance* terbukti diterapkan dengan baik oleh satuan kerja yang berada di wilayah Pusjatan Bidang SDK – Kementerian PUPR. Berdasarkan unsur utama *good governance* (Anggara, 2016) telah diimplementasikan dengan baik, mulai dari segi akuntabilitas, transparansi, keterbukaan dan aturan hukum.

Jika tata kelola pemerintahan dalam lini (Eselon III) tersebut diterapkan dengan baik, maka output yang dihasilkan untuk diberikan kepada masyarakat pun juga baik. Artinya, tidak ada kesenjangan informasi dalam memberikan pelayanan kepada publik.

Seberhasil apapun penerapan *good governance*, pun memiliki keterbatasan. *Good governance* belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat berkaitan dengan

layanan yang diberikan oleh seluruh kementerian. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengkaji lebih luas sehingga dapat meningkatkan tingkat kepercayaan publik atas layanan pemerintah Indonesia terhadap warga negaranya.

#### DAFTAR PUSTAKA

Anggara, Sahya. 2016. Ilmu Administrasi Negara: Kajian Konsep, Teori, dan Fakta dalam Upaya Menciptakan *Good Governance*. CV. Pustaka Setia: Bandung

Bandur, Agustinus. 2016. Penelitian Kualitatif: Metodologi, Desain, dan Teknik Analisis Data dengan NVIVO 11 plus. Mitra Wacana Media: Jakarta

Dwiridotjahjono, Jojok. 2010. Penerapan Good Corporate Governance: Manfaat Dan Tantangan Serta Kesempatan Bagi Perusahaan Publik di Indonesia, Jurnal, Diakses 6 Agustus 2017, pada <http://journal.unpar.ac.id>.

Handoko, Ari. 2015. Analisis pengaruh penerapan prinsip-prinsip good corporate governance , komitmen organisasi dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja instansi pemerintah. Universitas Muhammadiyah Surakarta

Meriani, Maria Magdalena dan Cherriya Dhia Wenny. 2017. Penerapan Good Corporate Governance pada Organisasi Nirlaba dan Organisasi Profit Oriented. STIE Multi Data: Palembang

Nordiawan, Deddi. 2008. Akuntansi Sektor Publik, Salemba Empat, Jakarta.

Pattiasina, Victor, Made Sudarma dan Sutrisno. 2010. pengaruh gaya kepemimpinan transformasional terhadap kinerja pelayanan dengan budayakerja dan *Good Corporate Governance* sebagai variable moderasi. Universitas Brawijaya

Putri, Bena Eka .2014. Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada PT Purnama Semesta Alamiah, Jurnal, Diakses 15 September 2017, pada <http://studentjournal.petra.ac.id>.

Sanusi, Anwar. 2011. Metode Penelitian Pendidikan, Alfabeta, Jakarta. Sanusi, Anwar. 2011. Metodologi Penelitian Bisnis, Salemba Empat, Jakarta. Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan, Alfa Beta, Jakarta.

Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Alfa Beta, Bandung.

[www. Tempo.com](http://www.Tempo.com)